

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan perbandingan, yang nantinya dapat menjadi sumber inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat mengindikasikan orisinalitas dari penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti disini mencantumkan sepuluh literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan daftar penelitian terdahulu yang masih berkaitan sesuai dengan tema yang akan dikaji oleh peneliti:

1. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fajar, Romli Gafur, Muhatta, dkk (2023). dengan judul “Pemberdayaan Pelaku UMKM Kerajinan Anyaman Bambu”. Penelitian ini diawali dengan penjelasan mengenai penurunan produktivitas di kalangan UMKM yang bergerak dalam kerajinan tangan anyaman bambu. Kondisi ini disebabkan oleh harga produk yang relatif rendah dibandingkan dengan biaya bahan baku. Penulis menekankan pentingnya meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk yang bernilai tinggi serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi penyuluhan dan praktik, yang dilaksanakan di desa Tega Maja. Kegiatan pelatihan terdiri dari dua sesi, yaitu penyampaian materi dan praktik langsung dalam menganyam bambu.

Hasil dari pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum sepenuhnya memahami materi sebelum pelatihan. Namun, setelah mengikuti pelatihan, terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Peserta yang merasa "sangat paham" meningkat dari 2 menjadi 20 orang, sementara peserta yang "paham" bertambah dari 11 menjadi 20 orang. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pelatihan dan penyuluhan mengenai kerajinan tangan anyaman bambu berhasil meningkatkan kreativitas dan kemampuan kewirausahaan peserta. Terdapat kemajuan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan, dengan harapan

bahwa produk yang dihasilkan dapat bersaing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat pasca-pandemi.

2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Baharudin dan Sodiah (2023) dengan judul "Pemberdayaan UMKM Kerajinan Tangan Anyaman di Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Melalui Pendampingan Strategi Pemasaran Digital". Penelitian ini dimulai dengan menyoroti pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin deras. Penulis menekankan potensi kerajinan anyaman yang ada di Desa Perdamaian, mengingat banyak warga setempat yang berprofesi sebagai petani. Pengembangan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, yang memungkinkan penulis memperoleh data akurat mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha kerajinan mereka.

Penulis menegaskan bahwa pemasaran digital memiliki kemampuan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam pemasaran konvensional. Dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform online, UMKM dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, penulis juga menggarisbawahi perlunya dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan peningkatan akses internet yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi usaha di daerah. Di akhir jurnal, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman tentang digital marketing sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan eksistensi mereka di pasar. Saran yang diberikan mencakup pentingnya dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM di kawasan tersebut.

3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Gst. B Ngr. P. Putra, Anak Agung Ketut Jayawarsa, dkk. (2021) dengan judul "Pemberdayaan

Usaha Kerajinan Anyaman Bambu Karya Kelompok Usaha Ibu-Ibu “Sari Murni” Desa Landih, Dusun Buayang-Bangli”. Jurnal ini mengulas tentang program kemitraan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan usaha kerajinan anyaman sokasi yang dikelola oleh kelompok "Sari Murni" di Desa Landih, Bangli. Kerajinan ini memanfaatkan bambu karena kekuatannya yang lentur dan sifatnya yang ramah lingkungan. Namun, kelompok Sari Murni menghadapi beberapa tantangan, antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana produksi, kurangnya jangkauan pemasaran, serta kemampuan yang terbatas dalam pencatatan transaksi keuangan.

Program kemitraan masyarakat ini menawarkan tiga solusi utama untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu: peningkatan sarana dan prasarana produksi, pelatihan pencatatan transaksi keuangan dengan sistem digital, serta manajemen pemasaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Program ini melibatkan 14 pengrajin dari kelompok "Sari Murni" dan dilaksanakan dalam dua pertemuan. Kegiatan program mencakup penyediaan sarana produksi, pelatihan mengenai pencatatan keuangan melalui aplikasi, serta pelatihan pemasaran secara online. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok pengrajin Sari Murni. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi program berlangsung dengan baik.

4. Penelitian yang keempat dengan judul “Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kerajinan Manik-Manik di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” yang ditulis oleh Eko Budi Santoso, Daffa Ramadhan Wardana, Annisa Rahmadanita (2024). Kerajinan manik-manik adalah salah satu bentuk usaha mikro yang memiliki potensi besar dalam memajukan perekonomian lokal, khususnya di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, pelaku usaha mikro di daerah ini dihadapkan

pada berbagai tantangan, terutama dalam pengadaan bahan baku berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif.

Informan dalam penelitian ini meliputi pegawai Dinas Koperasi dan UKM, pelaku usaha mikro, serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku berkualitas, yang umumnya harus didatangkan dari luar kota. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan para pelaku usaha. Melalui jurnal ini, dibahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dalam industri kerajinan manik-manik dan ditekankan pula perlunya program pemberdayaan yang berkelanjutan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan tepat.

5. Penelitian yang kelima adalah penelitian dengan judul "Pengembangan UMKM Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan" yang ditulis oleh Yenni Vera Fibriyanti, Noer Rafikah Zulyanti, dan Alfiani (2021). Jurnal ini mengkaji peran kerajinan anyaman di Desa Sumberjo dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan dan ketelatenan dalam proses pembuatan kerajinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada diskusi kelompok. Terdapat tiga kegiatan utama dalam upaya pemberdayaan yang dilaksanakan, yaitu: koordinasi dan observasi, pelatihan keterampilan serta pembuatan laporan keuangan, dan evaluasi kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87% peserta merasakan peningkatan keterampilan dalam membuat produk anyaman, 90% merasa lebih mampu dalam menyusun laporan keuangan, dan 88% percaya bahwa UMKM dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pelatihan yang diberikan terbukti berhasil dalam meningkatkan keterampilan praktis pengrajin. Masyarakat Desa Sumberjo menunjukkan

antusiasme yang tinggi untuk mengembangkan UMKM kerajinan anyaman. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan daya saing produk. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih fokus pada pengembangan teknik pemasaran yang lebih luas.

6. Penelitian keenam adalah penelitian yang ditulis oleh Annisa Fajri (2023) dengan judul “Pemberdayaan Usaha Kerajinan Anyaman Industri Kreatif Penghasil Bambu Desa Kaliwungu Semarang” Penelitian ini membahas pemberdayaan usaha kerajinan anyaman bambu di Desa Kaliwungu, Semarang, sebagai bagian dari industri kreatif. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan usaha anyaman bambu, antara lain dengan membangun branding produk, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, serta merancang desain produk yang lebih modern dan menarik. Selain itu, penting pula untuk memberikan pendampingan serta evaluasi secara berkala kepada para pengrajin. Dengan upaya pemberdayaan ini, diharapkan pengrajin mampu memasarkan produk anyamannya secara lebih luas melalui platform media sosial, sehingga mereka sudah tidak bergantung hanya kepada satu pengepul dan bisa memasarkan produk dengan harga yang lebih menguntungkan. Selain itu, para pengrajin diharapkan dapat menciptakan beragam desain produk anyaman bambu yang berkualitas, guna meningkatkan daya saing mereka di pasar.
7. Penelitian yang ketujuh adalah penelitian yang ditulis oleh Fatmaul Dyah Ngazizah dan Susi Widjajani (2024) dengan judul “Pemberdayaan pengrajin anyaman bambu sebagai upaya inovasi UMKM Buket di Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini membahas pemberdayaan pengrajin anyaman bambu di Desa Tanjungsari, Kabupaten Kebumen, yang bertujuan untuk mengembangkan inovasi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Proses pemberdayaan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap,

meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahapan pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengenalan produk buket dengan inovasi anyaman bambu, pelatihan untuk meningkatkan kualitas bahan bambu dan kreativitas dalam teknik anyaman, serta pelatihan pembuatan buket menggunakan variasi anyaman bambu. Pengrajin anyaman bambu memberikan respon positif terhadap kegiatan ini, dan diharapkan langkah tersebut dapat mendorong para pelaku UMKM buket di Kabupaten Kebumen untuk berinovasi dalam produk mereka dengan memanfaatkan anyaman bambu. Secara keseluruhan, program pemberdayaan yang diberikan ini telah memberikan manfaat signifikan bagi para pengrajin, termasuk peningkatan keterampilan, pembentukan jaringan kerja sama, serta peningkatan pendapatan. Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan ini, diperlukan dukungan dalam bentuk akses kerja sama dengan pelaku UMKM buket di wilayah tersebut. Selain itu, diharapkan akan ada kegiatan lanjutan yang terus mendorong inovasi produk buket dengan menggunakan bahan anyaman bambu.

8. Penelitian yang kedelapan adalah penelitian yang ditulis oleh Eva Tyas Utami, Rike Oktarianti, Dwi Setyati, dan Anik Swandari (2025) dengan judul “Pemberdayaan UMKM Gerabah Kesilir Melalui Pembentukan Komunitas Pra Koperasi”. Jurnal ini mengulas mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor industri gerabah yang berlokasi di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Penulis menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengrajin setempat, seperti keterbatasan modal, kurangnya jaringan pemasaran, dan minimnya upaya regenerasi usaha. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun industri gerabah di Kesilir memiliki beragam produk, para pengrajin masih mengalami kendala signifikan, seperti akses modal yang terbatas dan kurangnya peluang pemasaran. Penulis berpendapat bahwa pembentukan pra-

koperasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kondisi ekonomi para pengrajin gerabah. Dengan mengakses sumber daya dan pengetahuan yang lebih baik, pengrajin dapat meningkatkan kualitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta memastikan keberlanjutan usaha mereka. Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa sesi pelatihan telah berhasil memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan kepada para pengrajin. Kesimpulannya, inisiatif untuk memberdayakan pengrajin gerabah di Kesilir melalui pembentukan komunitas pra-koperasi merupakan langkah yang menjanjikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan memastikan keberlanjutan kerajinan yang ada.

9. Penelitian yang kesembilan adalah penelitian yang ditulis oleh Rizki Amelia Nasution, Khoridatunnida, Indah Nurhaliza, dkk. (2024) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pembuatan Sapu Lidi Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tamaran". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sapu lidi yang terbuat dari bahan lokal, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat di Desa Tamaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR), di mana dilakukan kolaborasi langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan menerapkan tindakan secara bersama-sama.

Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh anggota rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku hingga konsumen, untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Rantai pasok ini mencakup berbagai pihak seperti pemasok bahan baku, produsen sapu lidi, pedagang, hingga konsumen itu sendiri. Produksi sapu lidi ini memanfaatkan bahan alami yang tersedia di desa, seperti daun kelapa, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses pasar yang terbatas, kurangnya keterampilan manajemen bisnis, serta minimnya

inovasi dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan program pemberdayaan yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal produksi sapu lidi, manajemen bisnis, dan pemasaran digital.

10. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad akmal, Fika Aprilia Muntadhiroh, Indah Latifatun Nisak, dkk. (2024) dengan judul "Pemberdayaan UMKM Melalui Platform E-Commerce: Panduan Praktis Membuat Akun Shopee untuk Aries Craft Rajut". Jurnal ini menguraikan peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia, dengan fokus pada kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital, terutama dalam memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberdayakan Aries Craft Rajut melalui pelatihan tentang pembuatan dan pengelolaan akun Shopee.

Hasil dari inisiatif ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mitra dalam menggunakan platform Shopee. Mitra berhasil membuat akun Shopee yang lengkap dengan informasi yang menarik. Pelatihan ini juga membantu mitra dalam mengunggah produk dengan deskripsi yang informatif serta foto yang menarik. Inisiatif ini memberikan kesempatan bagi mitra untuk memperluas pasar dari tingkat lokal ke regional, sehingga menunjukkan potensi e-commerce dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Sebagai kesimpulan, kegiatan pengabdian masyarakat ini sukses memberdayakan Aries Craft Rajut dengan memberikan keterampilan penting untuk memanfaatkan e-commerce secara efektif. Penulis merekomendasikan agar ada dukungan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi dalam pengelolaan akun e-commerce.

Penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana pemberdayaan yang dilakukan kepada pengrajin atau pelaku usaha kerajinan bambu. Fokus dari penelitian-penelitian diatas bervariasi, mencakup model pemberdayaan, digital marketing dan pelatihan kepada pengrajin kerajinan anyaman bambu. Penelitian terdahulu mengidentifikasi masalah yang dihadapi seperti kurangnya pelatihan, dan juga minimnya pengetahuan dalam memasarkan produk kerajinan anyaman bambu ke pasar yang lebih luas. Penelitian yang akan dikaji pada saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, fokus utama dari penelitian ini adalah pada model pemberdayaan ekonomi kreatif kepada pengrajin anyaman bambu dan juga kolaborasi pemerintah desa dengan lembaga guna meningkatkan perekonomian lokal desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kerajinan anyaman bambu sebagai penghasilan utama dalam meningkatkan ekonomi lokal desa di Desa Puntukdoro, serta peningkatan pendapatan pengrajin dan peningkatan pendapatan terhadap desa dari pemasaran produk kerajinan anyaman bambu.

B. Kerangka Teori

1. Teori Pemberdayaan

a. Definisi Pemberdayaan

Secara bahasa pemberdayaan berawalan dari kata “daya” berarti “kekuatan”, dan menurut bahasa inggris jika diterjemahkan adalah “empowerment”. Jadi, dengan kata lain pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses memberikan kekuatan kepada kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi lemah dan belum mampu untuk mandiri.

Menurut Jim Ife dikutip dari bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), pemberdayaan merupakan upaya untuk menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan kepada warga negara. Melalui upaya ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, menurut teori actors Sarah Cook tentang pemberdayaan mengemukakan bahwa masyarakat dipandang sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan. Pendekatan ini menekankan

pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk melepaskan diri dari kendala yang kaku. Hal ini juga mencakup memberi kebebasan dalam menentukan pandangan, keputusan, dan tindakan yang diambil.

Berdasarkan berbagai pengertian pemberdayaan yang disampaikan oleh para ahli, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk menciptakan motivasi, daya dan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola potensi yang dimiliki agar terus berkembang untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.

b. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Kartasasmita (1995) dalam Margayaningsih (2018) mengatakan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan sebagai:

1. pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu sarana untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan potensi masyarakat merupakan langkah penting. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu dan komunitas memiliki kemampuan yang dapat terus dikembangkan. Dasar kemandirian dan pemberdayaan masyarakat terletak pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mandiri yang perlu didorong dan diberdayakan..
2. Menguatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilakukan melalui penerapan langkah-langkah konkret, penampungan berbagai masukan, serta penyediaan sarana prasarana dan tujuan yang baik, baik dari aspek fisik maupun aspek sosial.

c. Perspektif Pemberdayaan

Menurut Jim Ife dalam Dina (2023), konsep pemberdayaan mempunyai keterkaitan dengan dua konsep utama, yaitu konsep power (“daya”) dan konsep disadvantaged (“ketimpangan”). Untuk memahami pemberdayaan, kita dapat melihatnya dari empat perspektif yang berbeda: perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

1. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari sudut pandang pluralis, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang memberikan dukungan kepada individu dan kelompok yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing dengan lebih baik dalam menghadapi kepentingan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa bersaing secara sehat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mengajarkan kelompok atau individu cara bersaing dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan (*how to compete within the rules*).
2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menjalin hubungan dan mempengaruhi kelompok elite, seperti tokoh masyarakat, pejabat, dan orang kaya. Hal ini dengan tujuan membentuk kelompok gabungan dengan kalangan tersebut, melakukan konflik serta memfasilitasi perubahan didalam komunitas elite. Inisiatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di mana masyarakat sering kali terperangkap dalam ketidakberdayaan akibat adanya penguasaan dan pengawasan yang signifikan dari pihak elite tentang berbagai aspek sosial, termasuk media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.
3. Pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang strukturalis, merupakan suatu agenda perjuangan yang lebih menantang. Tujuan pemberdayaan ini dapat tercapai hanya jika ketimpangan struktural yang ada berhasil dihilangkan. Seringkali, masyarakat terjebak dalam ketidakberdayaan akibat adanya struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena perbedaan kelas sosial, jenis kelamin, ras, atau etnis. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar sebuah proses, melainkan juga sebuah upaya untuk membebaskan

dan melakukan perubahan struktural yang mendasar, serta menghapuskan segala bentuk penindasan yang bersifat struktural.

4. Pemberdayaan masyarakat, jika ditinjau dari sudut pandang post-strukturalis, pemberdayaan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang menantang dan mengubah diskursus yang sudah ada. Dalam konteks ini, penekanan pada pemberdayaan lebih difokuskan pada aspek intelektual dibandingkan dengan aktivitas, aksi, atau praktik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan pemahaman terhadap pemikiran baru dan analitis. Oleh karena itu, penekanan pada aspek pendidikan dalam pemberdayaan bukanlah sekadar sebuah tindakan.

d. Strategi Pemberdayaan

Menurut Jim ife dalam (Fuaidi, 2024), terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan dalam memberdayakan masyarakat, diantara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*)

Untuk mengembangkan perubahan dalam struktur dan institusi, penting agar masyarakat dapat mengakses berbagai sumber kehidupan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, perencanaan dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang memadai, sehingga masyarakat dapat mencapai keberdayaan. Contohnya, kebijakan yang memberikan peluang kerja yang luas serta penetapan upah minimum (UMR) yang tinggi.

2. Aksi sosial dan politik (*sosial dan political action*)

Diartikan bahwa sistem politik yang tertutup perlu diubah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktivitas sosial maupun politik. Keterlibatan masyarakat dalam politik membuka peluang untuk menciptakan kondisi yang lebih memberdayakan.

3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan

Seringkali, masyarakat atau kelompok tertentu tidak menyadari bahwa mereka mengalami penindasan. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya keterampilan untuk bertahan hidup, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan menjadi langkah yang sangat penting untuk diimplementasikan. Misalnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan bekerja, serta menyediakan sarana dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai perubahan secara efektif kepada masyarakat.

e. Kekuatan Pemberdayaan

Menurut kutipan dari buku Zubaedi, upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya berlandaskan pemahaman bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat muncul akibat tidak memiliki kekuatan atau daya dari mereka sendiri (powerless) (Dr. Zubaedi, M.Ag., 2017). Jim Ife mengemukakan enam jenis kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan dalam pilihan pribadi. Usaha dalam pemberdayaan memiliki tujuan untuk memberikan harapan kepada orang-orang untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, serta memanfaatkan berbagai peluang demi mencapai kehidupan yang lebih baik.
2. Kekuatan terletak pada kemampuan individu untuk menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan berlangsung melalui pendampingan, yang di mana mereka dibantu dalam merumuskan kebutuhan yang sesuai dengan diri mereka.
3. Kekuatan dapat dicapai melalui kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat terwujud melalui meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas melalui berbagai bentuk budaya publik.

4. Kekuatan kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai lembaga, termasuk pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media, dan lain-lain.
5. Kekuatan sumber daya ekonomi dapat diartikan sebagai kekuatan pada pemberdayaan yang dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas dan kontrol terhadap berbagai aktivitas ekonomi.
6. Kekuatan kebebasan reproduksi artinya kekuatan pemberdayaan yang dimungkinkan dengan memberi masyarakat keleluasaan untuk memilih jalan proses reproduksinya.

2. Teori Kolaborasi

a. Definisi Kolaborasi

Kolaborasi merupakan istilah umum yang merujuk pada pola hubungan kerja sama yang melibatkan lebih dari satu pihak. Berbagai ahli telah mengemukakan definisi kolaborasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Meskipun demikian, semua definisi tersebut berakar pada prinsip yang sama, yang mencakup kebersamaan, kerja sama, pembagian peran, kesetaraan, dan pertanggung jawaban. Secara umum, kolaborasi dapat dipahami sebagai hubungan antara organisasi-organisasi yang berpartisipasi dan sepakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi, mereka bertukar informasi dan sumber daya, meraih manfaat bersama, serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan kolektif untuk menyudahi permasalahan.

Menurut Gray, kolaborasi dapat dipahami sebagai suatu tahapan dalam berpikir yang dimana para pihak yang terlibat saling mengidentifikasi berbagai aspek yang membedakan pandangan mengenai suatu masalah. Dalam proses ini, mereka berupaya menemukan penyelesaian atas perbedaan-perbedaan tersebut,

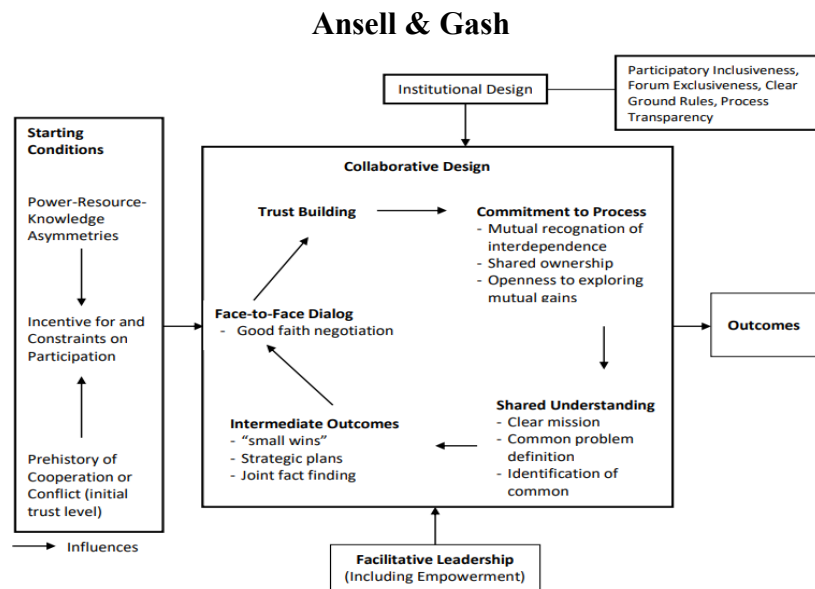
sekaligus mengatasi keterbatasan sudut pandang yang ada tentang kemungkinan langkah apa yang dapat diambil (Bustomi et al., 2022). Menurut Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu proses sosial yang melibatkan berbagai kegiatan. Dalam kolaborasi, setiap individu berusaha meraih sebuah tujuan bersama yang saling mendukung dan saling memahami aktivitas satu sama lain (Batoebara, 2021).

b. Definisi Collaborative Governance

Definisi collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008) mengacu pada suatu bentuk struktur tata kelola, di mana satu atau lebih badan publik berkolaborasi langsung dengan aktor nonpemerintah dalam suatu proses pengambilan keputusan yang terstruktur. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan difokuskan pada perumusan atau implementasi kebijakan publik. Selain itu, pendekatan ini juga dapat diterapkan dalam pengelolaan program atau aset publik (Batoebara, 2021).

Menurut pemaparan Agranof dan McGuire (Joo Chang, 2009), kolaborasi dalam pemerintahan telah memberikan perhatian besar terhadap kolaborasi secara sukarela serta hubungan horizontal antar para peserta dari berbagai sektor. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tuntutan yang diajukan oleh klien sering kali melebihi kapasitas serta peran dari organisasi publik yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menjalin komunikasi antara berbagai organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam aktivitas publik. (Ibrahim, 2022).

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance menurut



Sumber: Model of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008)

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Starting Condition (Kondisi Awal) dalam tahap awal hubungan antar para pemangku kepentingan yang kemudian setiap aktor membawa latar belakang yang berbeda-beda, yang pada gilirannya dapat menciptakan hubungan asimetris diantara mereka.
2. Kepemimpinan Fasilitatif, dalam kepemimpinan fasilitatif terdapat tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:
 - a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
 - b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
 - c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3. Desain institusional (Institutional Design) Ansell and Gash mendeskripsikan bahwa desain Institusional merujuk pada protokol dan aturan dasar yang diperlukan untuk menjalin kolaborasi yang efektif. Salah satu faktor yang memengaruhi dalam proses kolaborasi ini adalah legitimasi prosedural. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bersikap terbuka dan inklusif dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process) Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai suatu perkembangan melalui tahapan-tahapan tertentu. Gray, yang dikutip oleh Ansell dan Gash, mengidentifikasi terdapat tiga tahapan dalam proses kolaborasi, yaitu penentuan permasalahan (problem setting), penentuan tujuan (direction setting), dan tahap implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka (face to face)
2. Membangun kepercayaan (trust Building)
3. Komitmen terhadap proses (commitment to process)
4. Share Understanding
5. Hasil Sementara

3. Teori Pengembangan Ekonomi Lokal

a. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Blakely dan Bradshaw (1994) Pembangunan ekonomi lokal (PEL) atau *Local Economic Development (LED)* merupakan sebuah proses yang dimana pemerintah dan organisasi masyarakat berkolaborasi dalam mendorong, memotivasi, dan mempertahankan aktivitas bisnis guna menghasilkan kesempatan kerja yang baru. (Marasabessy et al., 2023). Menurut Munir (2007), Pengembangan ekonomi lokal (LED) adalah

suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga pembangunan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, LED berupaya menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan menguatkan aktivitas industri serta bisnis pada wilayah lokal.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah sebuah tahapan pembangunan yang mengusung konsep perencanaan partisipatif, yang dilaksanakan oleh sebuah daerah yang melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta) dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan perekonomian daerah memegang peranan yang sangat penting. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjalankan perannya sebagai pionir, koordinator, pengelola, dan promotor pembangunan. Peran pemerintah daerah sangatlah krusial dalam memperhatikan infrastruktur dalam mendukung kegiatan komersial dan industri, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, keterlibatan sektor swasta dan kelompok masyarakat pun diperlukan dalam pengelolaan daerah serta dalam mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang ada.

b. Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Tujuan yang dikutip oleh oleh Putri, M.H.C & Putri, N.T (2022) dalam Blakely dan Bradshaw (1995) menjabarkan terdapat 3 tujuan pengembangan ekonomi lokal, yaitu:

1. Menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas untuk masyarakat setempat.
2. Menjangkau kestabilan ekonomi lokal;
3. Membangun basis ekonomi dan kesempatan kerja yang luas dan beragam.

Untuk menjangkau tujuan dari LED, diperlukan beberapa strategi yang diterapkan. Prasyarat keberhasilan strategi tersebut diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi kesempatan, tantangan dan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan strategi;
2. Menentukan sasaran pembangunan ekonomi dengan jelas;
3. Salah satu cara menghasilkan lapangan kerja terbaik ada di sektor dasar;
4. Menentukan sektor unggulan dalam perekonomian daerah;
5. Mengidentifikasi hubungan penting antara ekonomi lokal dan ekonomi luar/eksternal untuk memperkirakan bagaimana sektor dan infrastruktur lokal merespon perubahan ekonomi regional, nasional dan internasional;
6. Mengelola potensi lokal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai stabilitas, serta mengidentifikasi dan mengurangi berbagai hambatan yang menghalangi pembangunan ekonomi;
7. Menganalisis tantangan yang muncul akibat populasi dan kepemimpinan politik yang berdampak signifikan pada lapangan pekerjaan, pendapatan, penerimaan dan pengeluaran publik, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat setempat.

c. Indikator Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Blakely dalam Ari Susanti (2020) keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Memperluas kesempatan bagi masyarakat kecil dalam hal lapangan pekerjaan dan peluang usaha;
2. Perluasan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
3. Pemberdayaan kelembagaan usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran;
4. Pemberdayaan kelembagaan jaringan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

d. Kriteria Pengembangan Ekonomi Lokal

menurut Blakley (1987) dalam (Marasabessy (2023), kriteria-kriteria ekonomi lokal meliputi hal-hal berikut:

1. Bahan Baku dan Sumber Daya Lokal

Bahan baku lokal adalah material yang digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan barang jadi. Dalam kriteria ini, dijabarkan bahwa sebanyak 35 jenis bahan baku yang diperoleh harus berasal dari masyarakat di sekitar wilayah industri tersebut. Sumber daya merupakan suatu input untuk dijadikan sebuah output melalui suatu proses atau transformasi/perubahan. Sumber daya secara umum dibagi 2 yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengertian Blakely, bahan baku untuk pengembangan ekonomi lokal seharusnya berasal dari sumber yang dihasilkan atau diolah di dalam kawasan industri. Bahan baku dari luar kawasan tidak diperkenankan karena dapat mengurangi kekuatan sektor basis.

2. Dapat Dioperasikan Oleh Penduduk Lokal Sesuai Dengan Kemampuan yang Dimiliki

Kegiatan industri yang mendukung ekonomi lokal sepenuhnya dijalankan oleh penduduk setempat, dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada di masyarakat.

3. Pengusaha Dan Tenaga Kerja yang Dominan Seharusnya Merupakan Penduduk Lokal

Kriteria ini mengharuskan bahwa baik pengusaha maupun tenaga kerja sebagian besar berasal dari masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian lokal, penting bahwa sumber daya manusia dalam suatu industri terdiri dari anggota komunitas lokal.

4. Melibatkan Sebagian Besar dari Penduduk Lokal

Dalam sebuah proses kegiatan industri, masyarakat lokal dilibatkan secara aktif. Kehadiran mereka tidak hanya terbatas pada proses produksi, tetapi juga mencakup aspek-aspek

lain yaitu seperti penyediaan bahan baku dan pemasaran hasil produk industri. Hubungan yang erat antara industri dan masyarakat ini berfungsi sebagai penguat dalam upaya meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut. Tujuan dari keterkaitan ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

5. Skala pelayanan yang kecil ditandai oleh jumlah investasi dan tenaga kerja dalam skala terbatas. Hal ini terlihat dalam aspek modal, produksi, dan pemasaran, di mana cakupan layanan yang diberikan masih relatif kecil.

6. Terdapat Organisasi/Kelompok Kegiatan Ekonomi

Dalam sebuah kawasan industri, terdapat organisasi atau kelompok yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi. Organisasi atau kelompok ini dibentuk sebagai wujud dari aktivitas industri yang ada, dengan tujuan untuk mendorong dan mengembangkan sektor industri tersebut. Mereka dapat berupa lembaga pemerintah maupun swasta.

7. Terdapat Keterkaitan Dengan Kegiatan Ekonomi Lain

Terdapat hubungan yang erat antara kegiatan industri dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan ini sangat penting dalam konteks industri, karena dapat menciptakan keterkaitan antara satu kegiatan ekonomi dan yang lainnya. Contohnya, dalam hal penyediaan bahan dasar, industri sangat bergantung pada bahan baku atau bahan dasar yang diperoleh dari luar. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dan signifikan antara para penyedia bahan baku dan industri itu sendiri.

8. Memunculkan Wirausaha Baru

Menciptakan wirausaha baru dari konteks industri yang dapat menghasilkan usaha-usaha baru, baik melalui dampak yang langsung maupun tidak langsung.